BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan keberadaanya sangat strategis dan merupakan moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan moda transportasi lain. Kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan sarana untuk meningkatkan roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. (Setiawan, 2021)

Semakin meningkatnya perkembangan suatu daerah karena adanya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik, maka akan semakin pesat juga pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan penunjang kegiatan perekonomian. Hal ini akan menyebabkan adanya keragaman aktivitas yang ditimbulkan yang memberikan pengaruh terhadap mobilitas masyarakat akan berbagai keperluan usaha, industri, bekerja, sekolah, maupun melakukan kegiatan sosial masyarakat lainnya. (Mandasari, 2022)

Pelabuhan Penyeberangan Bahaur merupakan salah satu Pelabuhan yang menjadi pintu gerbang keluar masuknya arus penumpang, barang dan kendaraan pada wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Pelabuhan Penyeberangan ini merupakan jenis Pelabuhan Perintis yang dilayani Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Drajat Paciran dengan lintasan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah- Pelabuhan Penyeberangan Paciran di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, saat ini beroperasi 1 kali dalam seminggu sehingga kerap kali belum dapat memenuhi permintaan dari masyarakat.

Pada kondisi saat ini Pelabuhan Penyeberangan Bahaur belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan karena belum diterapkannya zona sesuai dengan aturan yang berlaku yang menyebabkan masih bercampurnya

penumpang dan kendaraan pada saat bongkar muat karena melewati jalur yang sama, tidak teraturnya lapangan parkir antara pengantar/ penjemput dengan lapangan parkir siap muat karena masih bercampur. Hal ini bertentangan dengan kondisi ideal Pelabuhan sebagaimana yang tercantum dalam PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK. 104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Dimana tujuan penerbitan Peraturan ini sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman dan tertib di area Pelabuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil survey dilapangan maka penulis tertarik melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) yang berjudul “ **EVALUASI ZONASI DAN POLA ARUS LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BAHOUR KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**”.

B. Rumusan Masalah

Pada gambaran umum pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan PM No.91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan?
2. Bagaimana pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Fasilitas pendukung apa saja yang dapat membantu mendukung tata letak zonasi dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan ketertiban di Pelabuhan dan fasilitas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Seperti pembatasan wilayah antara kendaraan dan penumpang dan fasilitas yang hanya boleh dimasuki oleh petugas.
2. Mengetahui pola lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104?DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Mengetahui fasilitas yang dapat mendukung zonasi dan pola arus lalu lintas agar teratur.

D. Batasan Masalah

Agar pokok pembahasan yang akan dibahas di Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari penelitian, maka diperlukan adanya batasan ruang lingkup, batasan masalah ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut:

1. Obyek penelitian yang diteliti adalah Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Hal yang diteliti adalah penetapan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan PM No 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan dan pola arus lalu lintas penumpang dan

kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil teoritis ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan, pembangunan, transportasi dan sistem informasi peningkatan kapal. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk bahan ajar di perguruan tinggi dan menjadi referensi untuk penelitian- penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penetapan zonasi dan pola arus lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Taruna

Sebagai bahan pembelajaran bagi taruna dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama Pendidikan di Politeknik Transportasi SDP Palembang.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Untuk mengetahui tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Politeknik Transportasi SDP Palembang.
- 2) Menambah koleksi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Pemerintahan

Bagi BPTD sebagai bahan masukan agar lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan keselamatan pengguna jasa dan kinerja operasional dimasa yang akan datang guna membantu menunjang pelayanan sesuai standarisasi yang berlaku sehingga terciptanya pelayanan yang terbaik.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai pengetahuan untuk masyarakat calon pengguna jasa
- 2) Menambah wawasan masyarakat umum.